



Analisis Anggaran Berbasis Kinerja dan Akuntabilitas Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung

Andika Okta Wijaya^a, Indrayenti^b

^{a, b} Universitas Bandar Lampung, Jl. Raya Negeri Sakti No. 82, Lampung.

Email: andikaoktawijaya90@gmail.com^a, indrayenti@UBL.ac.id^b

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Received

Revised

Accepted

Kata Kunci:

Kinerja Anggaran,
Akuntabilitas,
Akuntabilitas
Kinerja, Anggaran
Berbasis Kinerja

Keywords:

Performance Budgets,
Accountability,
Accountability of
Performance,
Performance-Based
Budget

ABSTRAK

Penelitian analisis penyelenggaraan anggaran berbasis kinerja akuntabilitas kinerja di lembaga pemasyarakatan kelas I bandar lampung jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang pengalaman aktual yang terjadi di lapangan dan mengubahnya menjadi pernyataan-pernyataan yang sesuai dengan fenomena yang terjadi. Periode penelitian penelitian berlangsung selama 2 bulan yaitu dari november 2022 sampai dengan desember 2022 wawancara dilakukan kalapas, staff keuangan pengelolaan anggaran, staff umum hasil penelitian ini menggambarkan sistem penyelenggaraan anggaran berbasis kinerja terhadap akuntabilitas kinerja di Lembaga pemasyarakatan kelas 1 Bandar Lampung hasil penelitian prosedur pengajuan anggaran berbasis kinerja sesuai keputusan kementerian hukum dan HAM RI Nomor M.HH/03/2015 penyelenggaraan anggaran berbasis kinerja di terapkan sesuai dengan kebijakan kementerian keuangan.

ABSTRACT

Research on the analysis of performance-based budgeting on performance accountability in class 1 correctional institutions in Bandar Lampung. The type of research used is qualitative research. Aims to provide a clear picture of the experience that occurred in the field and turn it into statements that are appropriate to the phenomena that occur. The research study period lasted for 2 months, namely from November 2022 to December 2022 interviews were conducted with head of staff, budget management financial staff, general staff. Performance-based is regulated by the Decree of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Number M.HH/03/2015 Implementation of performance-based budgeting has been implemented by the Ministry of Finance's policy.

PENDAHULUAN

Pelaksanaan otonomi daerah pasca reformasi dinilai berdampak positif bagi

kemajuan daerah, tetapi masih belum optimal karena masih terjadi rendahnya serapan anggaran daerah serta banyaknya korupsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Kemajuan suatu daerah sangat dipengaruhi faktor kepemimpinan kepala daerah, salah satu pemberian yang dilakukan pemerintah pusat untuk pelaksanaan otonomi daerah adalah memperbaiki sistem keuangan negara. (Hastuti 2018)

Pemerintah menggunakan pendekatan penganggaran yang disebut Penganggaran Berbasis Kinerja (ABK), yang memungkinkan untuk mengidentifikasi korelasi antara biaya envelopgram dan keberhasilan program. Untuk memastikan kemanjuran dan efisiensi implementasi program, penilaian sumber input dan hubungannya dengan output dan hasil dapat dilakukan jika ada perbedaan antara desain dan pelaksanaan.(Junery M. F 2013)

SAKIP merupakan Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja. Fenomena yang terjadi dengan pelaksanaan SAKIP adanya semacam kekeliruan di kalangan aparatur pemerintah bahwa berhasil tidaknya suatu program dan kegiatan hanya didasarkan atas dasar penetapan anggaran, Melalui kajian Menpan-RB, karena menangani anggaran negara yang boros, tidak efisien dan tidak jelas dalam penggunaan anggaran. Hal ini dikarenakan banyak instansi pemerintah yang tidak memiliki tujuan yang jelas untuk dicapai, ukuran kinerjanya tidak jelas, kegiatan program tidak selaras, dan kegiatan tidak sesuai dengan tujuan kerja program.(Madani and Tahir 2022). Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung pelaksanaan SAKIP adanya semacam kekeliruan di kalangan Pegawai bahwa berhasil tidaknya suatu program dan kegiatan hanya didasarkan atas dasar penetapan anggaran jika anggaran habis maka program berjalan dengan baik (Maizar, 2023).

KAJIAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja, anggaran dan rencana kerja dibuat berdasarkan prestasi kerja yang diharapkan atau *on performance*, menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara. Penganggaran berbasis kinerja merupakan upaya untuk menyempurnakan proses penganggaran di sektor publik, demikian penjelasan Undang-Undang tersebut. Permendagri No. 13 Tahun 2006 yang mengatur prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah telah disahkan. Sejalan dengan Permendagri No. 13 Tahun 2006, penganggaran yang efektif akan menciptakan informasi kinerja yang valid dan akurat serta menjadi landasan penggunaan anggaran, sehingga dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku pembuatan laporan kinerja untuk pengendalian (Akbar, 2018).

Aspek *Ability* Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja adalah sebagai berikut.

a. *Performance Assessment Potential*

Pengukuran kinerja adalah prosedur yang metodis dan objektif untuk mengumpulkan, mengevaluasi, dan menerapkan data untuk menilai seberapa baik pelayanan pemerintah bekerja menuju tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Informasi yang diperoleh dari pengukuran kinerja kelompok perangkat daerah dapat digunakan untuk menentukan sasaran dan tujuan program secara tepat, rencana.

b. Human Force Potential

Aspek Potensi Manusia mengkaji kondisi mengenai upaya *capacity building* sumber daya manusia yang mampu merumuskan tujuan kinerja dan menghubungkan pengguna dengan informasi kinerja.

c. Technical Ability

Pertimbangkan persyaratan teknologi untuk sistem yang dapat menghasilkan bank data dan mengumpulkan data kinerja. Temuan studi lapangan menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Malang masih melakukan sejumlah kemajuan dalam hal perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja dengan sistem penganggaran berbasis kinerja.(Suharnoko, 2019).

Anggaran adalah manajemen menetapkan tujuan dan sasaran organisasi berdasarkan visi dan tujuannya. Dengan membuat rencana kegiatan operasional dengan satuan moneter, biasanya didefinisikan dalam bentuk anggaran, upaya dilakukan untuk memenuhi maksud dan tujuan perusahaan.(Kaharti, 2019).

Kinerja Hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawab yang dibebankan kepadanya” adalah bagaimana kinerja didefinisikan.(Sandewa Fadli 2018)

Akuntabilitas Kinerja Sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Yang dimaksud dengan SAKIP sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Pasal 1 adalah rangkaian sistematis berbagai kegiatan, alat, dan prosedur yang dibuat untuk menetapkan tujuan dan mengukur, mengumpulkan data, mengklasifikasikan, meringkas, dan melaporkan kinerja pemerintahan. instansi, semuanya dalam rangka akuntabilitas dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Menerapkan SAKIP untuk laporan penyusunan kinerja sesuai dengan persyaratan hukum dan peraturan. Perencanaan strategis, kesepakatan kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja, serta review dan penilaian kinerja merupakan bagian dari proses implementasi SAKIP.(Ristyana Ria, 2016).

Jenis Akuntabilitas

- a. Akuntabilitas vertikal Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan kepada otoritas yang lebih tinggi dikenal dengan akuntabilitas vertikal. Contohnya adalah pertanggungjawaban unit kerja (dinas) kepada pemerintah daerah dan pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat.
- b. Akuntabilitas horizontal Pertanggungjawaban horizontal merupakan pertanggungjawaban kepada masyarakat luas. (Andriani, Rosita, and Ihsan 2015)

Sifat akuntabilitas pemerintah pengguna laporan keuangan pemerintah harus dapat menilai tanggung jawab pemerintah untuk membuat keputusan ekonomi, sosial, dan politik dengan menggunakan informasi yang disediakan dalam laporan keuangan pemerintah. Hubungan antara orang-orang yang menjalankan suatu organisasi dan mereka yang secara formal memiliki wewenang atas mereka yang menjalankannya

disebut sebagai akuntabilitas. Dalam situasi ini, diperlukan juga pihak ketiga yang bertugas menjelaskan atau membenarkan semua tindakan yang diambil dan hasil bisnis yang dicapai dengan melakukan tugas dan mencari tujuan tertentu.(Andriani et al. 2015)

Indikator Akuntabilitas Kinerja Pemerintah

Renstra (Rencana Strategik) Tugas awal organisasi adalah melakukan perencanaan strategis. rencana strategis memiliki visi, tujuan, serangkaian tujuan, sasaran, dan strategi (kebijakan dan program) yang berbeda, serta ukuran yang berbeda untuk mengukur keberhasilannya.

Perencanaan Kinerja (Renja)Melalui berbagai event tahunan, proses perencanaan kinerja (Renja) menjabarkan tujuan dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis. Setiap kegiatan memiliki indikator kinerja input, output, manfaat, dan efek, serta rencana dan indikator tingkat pencapaian.

Pengukuran Kinerja,Perbandingan tujuan kinerja dan pencapaian setiap indikator target dan indikator kinerja kegiatan (input, output, hasil, manfaat, dan efek) dibuat dengan menggunakan teknik pengukuran ini.

Penilaian kinerja, tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mempelajari bagaimana indikator kinerja, kemajuan, dan tantangan yang dihadapi setiap kegiatan dalam mencapai visi dan misi dapat dilaporkan sehingga dapat dievaluasi dan diperiksa untuk peningkatan kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan selanjutnya.(Sofyani and Prayudi 2018)

METODE PENELITIAN

Penelitian kualitatif digunakan sebagai metode penelitian. Kajian penelitian kualitatif bertujuan untuk melukiskan gambaran yang jelas tentang pengalaman asli yang terjadi di lapangan dan mengubah pengalaman tersebut menjadi pernyataan yang relevan dengan kejadian (Zuchril, 2021).

Pengumpulan data, khususnya dokumen, adalah rekaman kejadian masa lalu berupa teks, gambar, atau usaha kolosal seseorang (dikutip Gunawan, 2016: 176). Wawancara adalah dialog yang digerakkan oleh tujuan. Wawancara dilakukan baik oleh pewawancara maupun yang diwawancarai.

Menurut Milles dan Hubermen (1984:21), analisis korelasi digunakan oleh para peneliti untuk menghasilkan prosedur pengolahan data kualitatif yang tampak baik sebagai kata-kata maupun bukan sebagai urutan numerik dari sejumlah sumber data (wawancara, observasi, dan dokumen). Analisis ini memiliki tiga aliran aktivitas paralel: reduksi informasi, tampilan informasi, dan kesimpulan/afirmasi.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Prosedur Anggaran Berbasis kinerja Dan Akuntabilitas Kinerja Lembaga Pemasyarakatan kelas I Bandar lampung

Prosedur pengajuan anggaran berbasis kinerja diatur dalam keputusan Menteri Hukum dan HAM RI nomor M.HH/03/2015 tentang petunjuk pelaksanaan, perencanaan, penganggaran, pengelolaan, dan barang milik negara serta LAKIP di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Prosedur pengajuan anggaran berbasis kinerja untuk mengajukan anggaran berbasis kinerja, perlu dilihat apakah di tahun sebelumnya sudah sesuai dengan rencana program dan selesai 100% atau pencapaiannya masih dibawah taget. Pengajuan anggaran berbasis kinerja juga perlu didasarkan pada kebutuhan. Prinsip ini mengacu pada prinsip *bottom up*, artinya anggaran dikeluarkan sesuai dengan kebutuhan yang direncanakan untuk tahun berikutnya. Prosedur pengajuan anggaran Pengajuan Pagu anggaran tahun 2022 dilakukan pada tahun 2020, Pengajuan anggaran 2022 harus sesuai dengan alokasi anggaran di susun staff keuangan pengeelolahan anggaran yang telah disetujui oleh Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Republik Indonesia dilakukan dengan tahap pengajuan rencana kerja dan anggaran kementerian negara/lembaga (RKA-KL) yang merupakan dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan lembaga pemasyarakatan kelas I bandar lampung sebagai penjabaran dari Rencana Kerja tahun anggaran serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya, tahap dalam penyusunan anggaran sebagai berikut.

- Tahap pertama yg dilakukan yaitu melaksanakan supervisi penyusunan pagu indikatif tahun anggaran 2022
- Tahap kedua yaitu melaksanakan supervisi penyusunan pagu anggaran tahun anggaran 2022
- Tahap ketiga yaitu melaksanakan supervisi penyesuaian pagu alokasi tahun anggaran 2022
- Tahap keempat (terakhir) yaitu saat alokasi anggaran telah disetujui maka keluar DIPA awal untuk anggaran tahun 2022

Tabel 1. Rencana Kinerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkokita di wilayah	1. Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan/ Narapidana/ Anak sesuai dengan standar	75%
		2. Persentase Tahanan/Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	93%
		3. Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	70%
		4. Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	80%
		5. Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	80%
		6. Persentase keberhasilan penanganan	70%

		penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	
		7. Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna korban penyalahgunaan narkotika	25%
2	Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan, dan Penanganan Narapidana	1. Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian	65%
		2. Persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi	
		3. Persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi	80%
		4. Persentase narapidana yang mendapatkan hak pendidikan	80%
		5. Persentase narapidana risiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi sadar, patuh, dan disiplin	15%
		6. Persentase narapidana yang memperoleh pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi	28%
		7. Persentase narapidana yang bekerja dan produktif	67%
3	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di Wilayah Sesuai Standar	1. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	80%
		2. Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	70%
		3. Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib	80%
		4. Persentase pemulihkan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	70%

Sumber: Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung, 2023

Tabel 2. anggaran sumber LAKIP Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung 2022

Kegiatan	Anggaran Awal
Program Pelayanan dan Penegakan Hukum	Rp. 7.806.035.000,-
Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah	Rp. 7.806.035.000,-
Program Dukungan Manajemen	Rp. 12.997.618.000,-
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Pemasyarakatan	Rp. 12.997.618.000,-
Penyelenggaraan Kegiatan Dukungan Administratif dan Fasilitatif Pelayanan Pemasyarakatan	Rp. 0,-
Total Keseluruhan	Rp. 20.783.653.000,-

Sumber: Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung, 2023

Penilaian dari suatu kinerja di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung juga didasarkan pada penyerapan anggaran karena kinerja berbasis anggaran. Semakin besar anggaran yang telah terserap untuk melaksanakan program maka kinerjanya dinilai bagus karena berarti sudah banyak program yang terlaksana yang dapat dilihat dari laporan-laporan.

Visi, misi perlu dalam penerapan tata nilai yang memberi arah bagi seluruh pegawai dalam bersikap dan berperilaku ketika menjalankan tugas dan fungsinya. Tata nilai tersebut juga akan menyatukan hati dan pikiran dalam usaha mewujudkan seluruh program Kinerja yang telah direncanakan. Untuk itu, Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung telah mengidentifikasi nilai-nilai yang harus dimiliki oleh setiap pegawai (*personal values*), diterapkan dalam melaksanakan pengelolaan proses pelayanan prima (*process values*), dan dikembangkan oleh pimpinan unit kerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung (*leadership values*).

Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung adalah instansi vertical Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, berkedudukan di provinsi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan HAM RI. Oleh karena itu, sebagai instansi vertikal dari Kementerian Hukum dan HAM RI, maka Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung serta mendukung dan melaksanakan visi dan misi Kementerian Hukum dan HAM RI Tahun 2020 – 2024

Visi Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung juga mendukung dan melaksanakan misi Kementerian Hukum dan HAM RI yaitu :

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia.
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing.
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan.
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan.
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada setiap warga.
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya.
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Program kegiatan yang dianggap menjadi prioritas lembaga pemasyarakatan kelas I bandar lampung program yang berguna untuk Wargabinaan, Pembinaan Kemandirian WBP (Warga Binaan Pemasyarakatan) Program yang berguna untuk Wargabinaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung, ilmu dan pelatihan dapat diterapkan di luar setelah mereka bebas dari masa tahana Program Pembinaan Di Lembaga pemasyarakatan kelas I Bandar Lampung terdiri dari program Pembinaan Kemandirian dan Kepribadian, Pembinaan Kemandirian terdiri dari Raja bakery, sulam tapis, pangkas rambut, konveksi, laundry, pertukangan, miniature, pengelasan, pertanian dalam, hidroponik atau pembibitan jahe, daur ulang sampah dan perikanan. Kemudian pembinaan kepribadian terdiri dari, majelis taqlim, mengaji, baca Al quran dan Iqro, peribadatan greja, upacara kesadaran berbangsa dan bernegara, marawis, band music, dan sekolah paket c Program Unggulan Lapas Kelas I Bandar Lampung terdiri dari Raja bakery, sulam tapis dan konveksi

Lembaga pemasyarakatan kelas I bandar lampung dalam mengevaluasi perencanaan kerja yang dilaksanakan setiap bulannya ada kendala dan realisasi yang belum tercapai akan di carikan solusinya jika tidak dapat direalisasikan secara penuh maka akan dilakukan pemaksimalan target kinerja dengan merevisi target anggaran, upaya yang dilakukan lembaga pemasyarakatan kelas I bandar lampung dalam

meningkatkan kinerja organisasi kedepannya dengan mengadakan rapat kepada seluruh jajaran Selaku kepala Lembaga Pemasyarakatan sebagai Role model Mengadakan rapat kepada seluruh jajaran pejabat maupun staff untuk membahas mengenai target kinerja yang telah disusun dan membuat komitmen bersama

Program kerja dalam instansi pemerintah perlu dinilai akuntabilitas sebagai bentuk pertanggungjawaban atas keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan program/kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan. Program juga dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung untuk mewujudkan *good governance*. Untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja dan meningkatkan rasa tanggungjawab terhadap program atau kegiatan yang telah diamanatkan, perlu diadakan sistem assessmen dalam pengukuran kinerja kuantitatif dilakukan oleh Jajaran Kantor Wilayah dan Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan dibawahnya.

Pengukuran kuantitatif atas capaian standar layanan Pemasyarakatan dilakukan dengan menggunakan rumus :

$$\frac{\text{Persentase pencapaian}}{\text{Rencana tingkat capaian}} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Keterangan : semakin tinggi realisasi menunjukan pencapaian kinerja yang semakin baik

Tabel 3. capaian kinerja sumber LAKIP Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung 2022

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/ Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkokita di wilayah	1. Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan/Narapidana/ Anak sesuai dengan standar	75%	100%	100%
		2. Persentase Tahanan/ Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	93%	96%	96%
		3. Persentase Tahanan/Narapidana/ Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	79%	100%	100%
		4. Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	80%	100%	100%
		5. Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	80%	100%	100%

		6. Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	70%	100%	100%
		7. Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna korban penyalahgunaan narkotika	25%	0%	0%
2	Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan, dan Penanganan Narapidana	1. Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian	65%	86,82%	86,82%
		2. Persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi	98%	100%	100%
		3. Persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi	80%	100%	100%
		4. Persentase narapidana yang mendapatkan hak pendidikan	80%	87,50%	87,50%
		5. Persentase narapidana risiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi sadar, patuh, dan disiplin	15%	27%	27%
		6. Persentase narapidana yang memperoleh pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi	28%	16,47%	16,47%
		7. Persentase narapidana yang bekerja dan produktif	67%	74,97%	74,97%
3	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di Wilayah Sesuai Standar	1. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	80%	100%	100%
		2. Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	70%	100%	100%
		3. Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib	80%	93%	93%
		4. Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	70%	100%	100%

Sumber: Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung, 2023

Prosedur Anggaran Berbasis kinerja Lembaga Pemasyarakatan kelas I Bandar lampung

Prosedur pengajuan anggaran berbasis kinerja diatur dalam keputusan Menteri Hukum dan HAM RI nomor M.HH/03/2015 secara umum penyelenggaraan anggaran berbasis kinerja sudah di terapkan sesuai dengan kebijakan kementerian keuangan dalam penyelenggaraan anggaran berbasis kinerja, visi, misi perlu dalam penerapan tata nilai yang memberi arah bagi seluruh pegawai dalam bersikap dan berperilaku ketika menjalankan tugas dan fungsinya. Tata nilai tersebut juga akan menyatukan hati

dan pikiran dalam usaha mewujudkan seluruh program Kinerja yang telah direncanakan, indikator pencapaian program, pengukuran kinerja kuantitatif dilakukan oleh Jajaran Kantor Wilayah dan Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan dibawahnya. Pengukuran kuantitatif atas capaian standar layanan Pemasyarakatan. Evaluasi program Lembaga pemasyarakatan kelas I bandar lampung dalam mengevaluasi perencanaan kerja yang dilaksanakan setiap bulannya ada kendala dan realisasi yang belum tercapai akan di carikan solusinya jika tidak dapat direalisasikan secara penuh maka akan dilakukan pemaksimalan target kinerja dengan merevisi target anggaran, analisis standar biaya dilakukan dengan mengevaluasi dan kebutuhan anggaran ditahun sebelumnya yang disesuaikan dengan harga barang atau jasa setempat (Bandar lampung)

Akuntabilitas Kinerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja. Akuntabilitas Lembaga pemasyarakatan kelas I bandar lampung Pengukuran kinerja kuantitatif dilakukan oleh Jajaran Kantor Wilayah dan Unit Pelaksana Teknis, dengan sasaran kinerja meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkokita di wilayah indikator kinerja kegiatan memenuhi makana bagi narapidana sesuai dengan standar realisasi 100% capaian 100%, indikator kegiatan mendapatkan kesehatan secara berkualitas realisasi 95,54 capaian 95,54 , indikator kinerja kegiatan, narapidana yang mengalami gangguan mental dapat tertaangani Realisasi 100% capaian 100%, indikator kinerja kegiatan narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar realisasi 100% capaian 100%, indikator kinerja kegiatan narapidana (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar realisasi 100% capaian 100%, indikator kinerja kegiatan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh) realisasi 100% capaian 100

Sasaran kinerja Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan, dan Penanganan Narapidana Risiko Tinggi, dengan rata- rata realisasi 90 capaian 90% dan sasaran kinerja Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di Wilayah Sesuai Standar rata- rata capaian 98 % realisasi 98, penilaian dan Pada area sasaran Penyelenggaraan Pelayanan Pemasyarakatan yang berkualitas di Wilayah UPT Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung telah menerapkan *survey* kepuasan masyarakat melalui barcode yang telah dipasang di area pelayanan yakni layanan kunjungan online, layanan penitipan barang, layanan integrasi di luar hingga di layanan online nilai rata-rata IPK dan IKM UPT pada tahun 2022 adalah 99,43. Sehingga ditemukan angka realisasi dari perhitungan hasil yang diraih UPT (99,43) dibagi (100) lalu dikalikan 100% yakni mendapat hasil 99,43%. rata-rata dengan capaian sangat baik pada Tahun Anggaran 2022.

SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang fenomena aktual mengenai anggaran penyelenggaraan berbasis kinerja dan akuntabilitas kinerja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum penyelenggaraan anggaran berbasis kinerja sudah diterapkan sesuai ruang lingkup anggaran berbasis kinerja dan akuntabilitas Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung sangat baik.

Keterbatasan dari pencapaian anggaran kinerja adalah karena ada masa pengantian kepemimpinan yang membuat seringnya pemberlakuan kebijakan-kebijakan sehingga perubahan kebijakan yang tidak pasti bagus.

Saran yang dapat penulis berikan kepada Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung yaitu agar dapat menyediakan data dan informasi mengenai kerangka acuan kerja untuk menentukan indikator, mengevaluasi, dan mengambil keputusan pengalokasian dana untuk suatu kegiatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, Dendy Syaiful. (2018). "Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja." *JAWARA: Jurnal Wawasan Dan Riset Akuntansi* 6(1):36–44.
- Andriani, Wiwik, Irdha Rosita, and Hidayatul Ihsan. (2015). "Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Dalam Mewujudkan Good Governance Pada Politeknik Negeri Padang." *Akuntansi Dan Manajemen* 10(2):51–60. doi: 10.30630/jam.v10i2.105.
- Hastuti, Proborini. (2018). "Desentralisasi Fiskal Dan Stabilitas Politik Dalam Kerangka Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Indonesia." *Simposium Nasional Keuangan Negara* 1(1):784–99.
- Junery M. F, Norhanisah. (2013). "PENGARUH ANGGARAN BERBASIS KINERJA TERHADAP PENINGKATAN KINERJA APARATUR PEMERINTAH DAERAH Studi Kasus Pada Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Bengkalis." *Journal of Chemical Information and Modeling* 53(9):1689–99.
- Kaharti, Eni. (2019). "Evaluasi Prosedur Penyusunan Anggaran Dan Penetapan Anggaran." *Ayan* 8(5):55.
- Madani, M., and N. Tahir. (2022). "Efektivitas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sakip) Di Sekretariat Daerah Kabupaten Wajo." *Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi* ... 3.
- Ristyana Ria. (2016). "Analisis Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Pemerintah Kabupaten Ponorogo." *Journal of Chemical Information and Modeling* 53(9):1689–99.

- Sandewa Fadli. (2018). "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Pegawai Di Kabupaten Banggai Kepulauan." *Jurnal Ilmiah Clean Government* Vol. 1, No(: E-2620-3014 : P-2614-7742):90–110.
- Sofyani, Hafiez, and Made Aristia Prayudi. (2018). "Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja Di Pemerintah Daerah Dengan Akuntabilitas Kinerja ‘A.’" *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis* 13(1):54–64.
- Suharnoko, D. (2019). "Efektivitas Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Kinerja Perangkat Daerah Di Kabupaten Malang." *Karta Rahardja: Jurnal Pembangunan Dan ...* 1(2):1–13.